ANALISIS PRAKTIK MERGER TIGA BANK SYARIAH PERSPEKTIF POJK NO. 41/POJK.03/2019

Mulfi Aulia¹, Salwa Dalilah Nasution²,

Abstrak

Praktik penggabungan Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 41/POJK.03/2019 dikenal dengan istilah konsolidasi, karena penggabungan ketiga bank tersebut terkesan mendirikan perusahaan dengan nama baru yaitu, Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tahapan-tahapan dari praktik merger tiga bank syariah dan kesesuaiannya dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 terhadap merger tiga bank syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif (doktrinal). Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Berdasarkan dari analisis data yang sudah dikumpulkan, tata cara merger tiga bank syariah terdapat sepuluh tahapan yang berkesesuaian dengan pasal 8, pasal 10 ayat 1, pasal 11 poin a, pasal 14, pasal 16 ayat 1, pasal 18 ayat 1, pasal 19, dan pasal 21 dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019.

Kata Kunci: Merger; Bank Syariah Indonesia; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019.

Abstract

Practice Merging of Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, and Sharia Bank Mandiri by Law no. 21 Year 2008, Government Regulation no. 28 of 1999, and the Regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 41 / POJK.03 / 2019 is known by consolidation, because the sub-merging of the bank has been established to establish a company with new names that is, Bank Syariah Indonesia. This study aims to see the stages of the Three Bank Syriaar Merger Practices and its conformity with the Financial Services Authority Regulation no. 41 / POJK.03 / 2019 to mergers of three sharia banks. The method used in this research is that qualitative method with the normative legal approach (doctrinal). This type of research in this study is the document study. Based on data analysis that has been collected, the merchant of three merger of sharia banks there are ten stages that are suitable to Clause 8, 10 paragraph 1, 11 Points A, 14, 16 paragraph 1, 18 paragraph 1, 19, and 21 of the Regional Financial Services Authority Regulation no. 41 / poj.k.03 / 2019.

Keywords: Merger; Bank Syariah Indonesia (BSI); OJK Regulation No. 41/POJK.03/2019.

¹Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta

²Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta
Email: salwanasution2000@gmail.com

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk Indonesia. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari total penduduk negara tetangga bahkan negara-negara Timur Tengah. Namun, tingkat pasar bank syariah masih sangat kecil, dibawah 7%. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia (BSI) dibentuk dengan tujuan memperkuat dan mengembangkan ekosistem ekonomi syariah dan industri halal nasional bersama-sama dengan lembaga syariah lain, baik korporasi, perbankan, ritel, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, bahkan organisasi kemasyarakatan serta BSI akan terus berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi, termasuk memacu pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah (BSI, 2021).

Perbankan syariah di Indonesia pertama kali diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Pemerintah membuat peraturan untuk menjalankan bank syariah. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tahun 1998 melakukan penyempurnaan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, yang menjelaskan bahwa perbankan mempunyai dua sistem (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Penyempurnaan ini disambut hangat oleh komunitas perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank syariah lain, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank IFI, Bank BTN, Bank Mega, Bank Niaga, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh (Alif Ulfa, 2021:1101).

Seiring berjalannya waktu perkembangan bank syariah di Indonesia semakin baik dari tahun ketahun dan telah menjadi tolak ukur keberhasilan hadirnya ekonomi syariah. Semenjak pandemi Covid-19 mewabah di Indonesia pertumbuhan ekonomi domestik melambat, pendapatan negara menurun, namun pengeluaran dan pendanaan negara meningkat, maka salah satu usaha pemerintah untuk mengatasi perekonomian negara adalah dengan memberikan kebijakan yang dapat membantu menaikkan perekonomian sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020. Oleh karena itu, merger tiga bank syariah diharapkan dapat menjadi titik balik yang positif dalam meningkatkan ekonomi negara (Ika Atikah, 2021:526-527).

Merger tiga bank syariah dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian pemerintah untuk memajukan ekonomi syariah sebagai pilar baru ekonomi nasional, memajukan pangsa pasar perbankan syariah, efisiensi biaya operasional dalam menjamin simpanan, seluruh bank syariah memiliki aset dan permodalan yang sangat kecil sehingga tidak masuk kategori sepuluh bank teratas dalam skala nasional apalagi pada tingkat internasional, bank syariah sebelum merger memiliki usaha atau produk yang banyak namun terpecah sehingga diharapkan setelah merger memiliki kekuatan produk yang lengkap, seperti *wholesale, consumer, retail*, UMKM, dan produk-produk lainnya. Masyarakat yang

menggunakan bank syariah sebelum dan sesudah merger yang nasabah bank syariah tertentu tidak memiliki layanan yang memadai rentan menggunakan produk-produk konvensional, hal ini memang tidak berdampak pada nasabah bank syariah tertentu yang fasilitas layanannya sudah memadai maka diharapkan dengan merger bank syariah dapat memudahkan akses pada semua kalangan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan jasa keuangan (Lida dan Elba, 2020).

Tiga bank syariah yang sudah merger mempunyai kelebihanannya masing-masing. Bank Mandiri Syariah yang terkenal dengan sistem kerja dan profesionalisme, Bank BNI Syariah dengan kemampuan inovasi, dan Bank BRI Syariah dengan sistem yang transparan. Sampai banyak yang memprediksi bahwa BSI akan menjadi sigap dan lebih kompetitif dari Bank Konvensional yang saat ini lebih menonjol (Bagus dan Sutantri, 2021:88).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum mendefinisikan penggabungan dan peleburan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari bank yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu bank baru yang karena hukum memperoleh aset, liabilitas, dan ekuitas dari bank yang meleburkan diri dan status badan hukum bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum (POJK No.41/2019).

Praktik penggabungan Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1999, dan POJK No. 41/POJK.03/2019 dikenal dengan istilah konsolidasi, karena penggabungan ketiga bank tersebut terkesan mendirikan perusahaan dengan nama baru yaitu, Bank Syariah Indonesia. Namun, praktik penggabungan ketiga bank syariah tersebut lebih dikenal dengan istilah merger karena secara fakta saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari ketiga bank tersebut tergabung pada saham PT. Bank BRI Syariah. Bank BRI Syariah sebelumnya sudah menjadi bank pelat merah yang tercatat di pasar bursa saham dan satu-satunya bank yang *public listing* (Sulaeman, 2020). Terlebih lagi ketiga bank syariah tersebut merupakan anak perusahaan BUMN.

Praktik merger tiga bank syariah dapat ditinjau dengan tiga tinjauan hukum, yaitu Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999, dan POJK No. 41/POJK.03/2019. Pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tidak membahas secara menyeluruh merger dan konsolidasi dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 dalam tata cara merger kurang relevan dengan praktik merger tiga bank syariah. Sedangkan, POJK No. 41/POJK.03/2019 lebih komprehensif dalam membahas hukum merger dan

konsolidasi pada suatu perbankan dan tata cara merger dalam peraturan ini lebih menyeluruh pada praktik merger tiga bank syariah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, penulis akan melakukan penelitian tentang bagaimana praktik merger tiga bank syariah dan bagaimana kesesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 terhadap merger tiga bank syariah.

Jenis penelitian yang dimuat dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah untuk mengemukakan masalah, objek, dan tindakan yang dapat meningkatkan pemahaman peneliti tentang persoalan yang diteliti (Ajat Rukajat, 201:26).

LANDASAN TEORITIS

Perbankan merupakan lembaga yang sangat penting dalam memajukan prekonomian negara dengan fungsi utamanya adalah menyimpan dana, menyalurkan dana, dan memberikan layanan jasa kepada masyarakat. Agar fungsi utama bank dapat berjalan dengan baik dibutuhkan kinerja yang kuat dan sistem perbankan yang efektif sehingga dapat bersaing di pasar global (Ismail, 2016:23). Salah satu upaya agar perbankan dapat bersaing di pasar global adalah dengan melaksanakan penggabungan bank.

Penggabungan bank secara umum terdapat 3 bentuk, yaitu merger, konsolidasi, dan akuisisi (Muhammad Rauuf, 2021:834). Merger berasal dari bahasa latin, yaitu "*mergere*" yang memiliki arti bergabung bersama, menyatu, berkombinasi, dan menyebabkan hilangnya identitas karena terserap atau tertelan sesuatu (Nur Khasanah, 2017:9). Konsolidasi adalah dua perusahaan atau lebih bergabung dan membentuk entitas baru. Konsolidasi juga dapat diartikan dengan meleburnya dua perusahaan atau lebih menjadi suatu perusahaan baru dengan mengambil alih aset dari perusahaan yang meleburkan diri (Josua Tarigan, 2021:8). Kata akuisisi berasal dari Bahasa Inggris, yaitu "*acquisition*" yang biasa dikenal dengan istilah "*take over*" yang mempunyai arti pengambilalihan oleh suatu perusahaan untuk mengambil alih penguasa modal perusahaan lain dengan cara membeli saham mayoritas dalam perusahaan tersebut (Irwati, 2017:134). Akuisisi adalah jenis merger di mana satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain dan kepemilikannya telah beralih ke perusahaan yang mengakuisisi meskipun nama perusahaan target masih ada (Josua Tarigan, 2021:8).

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan tentang pengertian penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu bank atau lebih untuk menggabungkan diri dengan bank lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari bank yang menggabungkan

diri beralih karena hukum kepada bank yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum bank yang menggabungkan diri berakhir karena hukum (UU RI No. 21 Tahun 2008). Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua bank atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu bank baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari bank yang meleburkan diri dan status badan hukum bank yang meleburkan diri berakhir karena hukum (UU RI No. 21 Tahun 2008). Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas bank tersebut (UU RI No. 21 Tahun 2008).

Merger merupakan penggabungan usaha dua perusahaan atau lebih untuk mencapai tujuan dan kepentingan bersama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Merger merupakan salah satu strategi untuk membangun pasar baru tanpa harus membangunnya dari awal. Merger perusahaan menggabungkan usaha untuk mencapai kesepakatan dan tujuan bersama. Kepemilikan saham pada perusahaan gabungan tetap menjadi pemilik saham perusahaan yang tergabung. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih menjadi satu kesatuan dengan salah satu perusahaan tetap berdiri sebagai badan hukum, sedangkan nama dan aset dari perusahaan yang lainnya secara keseluruhan masuk dalam perusahaan yang berdiri tersebut (Budi Untung, 2019:2).

Merger, konsolidasi, dan akuisisi bank dapat meningkatkan kekuatan sistem perbankan agar dapat bersaing di pasar bebas pada era globalisasi. Dari pengertian merger, konsolidasi, dan akuisisi bank yang sudah disebutkan sebelumnya, merger bank merupakan penggabungan dua atau lebih bank dengan salah satu bank tetap berdiri sehingga dapat memperluas usaha bank dan menjadikan bank lebih kuat, bagi bank yang menerima merger akan mengambil alih seluruh aset, hutang, dan saham dari bank yang menggabungkan diri. Konsolidasi bank adalah peleburan dua atau lebih bank dengan mendirikan bank baru sehingga dapat memperluas usaha bank dan menjadikan bank lebih kuat, bagi bank yang menerima konsolidasi akan mengambil alih seluruh aset, hutang, dan saham dari bank yang meleburkan diri. Akuisisi bank adalah pengambilalihan kepemilikan bank dengan pembelian saham diatas 50% menjadikan beralihnya kepemilikan atas bank tersebut tanpa merubah nama bank.

Merger, konsolidasi, dan akuisisi bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan badan usaha. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tujuan merger, konsolidasi, dan akuisisi bank adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang berdaya saing dan efisien dengan penguatan struktur industri perbankan nasional (POJK

No.41/2019). Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tujuan konsolidasi bank adalah untuk mendorong penguatan permodalan bank dan konsolidasi perbankan di Indonesia sehingga dapat mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional untuk menghadapi dinamika perekonomian serta teknologi informasi domestik dan global (POJK No.12/2020). Tujuan akuisisi secara umum adalah untuk pertumbuhan perusahaan, dapat memasuki pasar baru, mendominasi pasar, memperbesar skala ekonomi, diversifikasi, dapat melakukan pemindahan keahlian teknis dan fungsi, dan memaksimalkan portofolio produk (Adler Haymans, dkk, 2021:31).

Praktik merger pada umumnya adalah pertukaran saham antara perusahaan-perusahaan yang dibubarkan. Merger dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama dan kemajuan bank. Mengoptimalkan perluasan dan memperkuat permodalan untuk mendapatkan pendanaan yang lebih kuat untuk perekonomian yang solid dan stabil. Beberapa tujuan merger bank adalah: *pertama*, meningkatkan pertumbuhan kualitas bank. *Kedua*, mengoptimalkan pelaku usaha di pasar. *Ketiga*, merger bank dapat meningkatkan kesehatan bank. *Keempat*, mencegah bank gulung tikar. *Kelima*, peningkatan jangka Panjang. *Keenam*, menambah saham bank. *Ketujuh*, mendominasi pasar. Otoritas Jasa Keuangan menyatakan ada kebutuhan mendesak untuk mendirikan bank syariah besar. Langkah yang paling cepat diterapkan adalah dengan menggabungkan tiga bank syariah BUMN yang sudah ada. Melalui merger, pemerintah akan lebih mudah mengakses produk dan layanan perbankan. Saat melakukan merger bank, masing-masing bank menyiapkan tujuan merger bank, sama halnya dengan tiga bank syariah BUMN. Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan peran bank syariah dalam pengembangan industri keuangan syariah. Pengembangan keuangan syariah diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi kemakmuran rakyatnya. Dengan melakukan merger bank, maka memiliki modal yang lebih besar, oleh karena itu memudahkan akses ke grup perusahaan yang lebih besar dan mendapatkan lebih banyak keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan dari merger akan menguntungkan khususnya kepada nasabah dan pelaku ekonomi (Hasan dan Kiki, 2021: 23). Merger mempunyai macam-macam jenis dengan tujuan yang berbeda-beda. Munir Fuady menyatakan ada 4 jenis merger, yaitu: *pertama*, merger horizontal. *Kedua*, merger vertical. *Ketiga*, merger konglomerat. *Keempat*, merger konglomerat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Merger tiga bank syariah menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI) pada tahun 2021 menjadi terobosan baru bagi perbankan syariah nasional. Beberapa

bank yang terpilih untuk merger diantaranya adalah Bank Bri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Sejarah bank BRI Syariah Dimulai dengan akuisisi antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bank Jasa Arta tanggal 19 Desember 2007, diperoleh izin dari Bank Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2008 dengan surat No. 10/67/KEP.GBI/DpG/2008, dan secara resmi PT. Bank BRI Syariah Tbk., beroperasi pada 17 November 2008. Setelah penandatanganan akta pemisahan Usaha Unit Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang melebur kepada PT. Bank BRI Syariah Tbk., melalui proses *spin off* yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2008 kemudian ditandatangani oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktu Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rohardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRI Syariah Tbk. dan mulai berjalan pada tanggal 1 Januari 2009 semua kegiatan dalam PT. Bank BRI Syariah Tbk., semakin solid. Selanjutnya, PT. Bank BRI Syariah Tbk., melakukan transformasi kegiatan usaha yang semula berjalan secara konvensional menjadi perbankan dengan prinsip syariah (BSI, 2021).

Sejarah bank BNI Syariah berawal dari tim proyek cabang syariah mempunyai tujuan untuk menyiapkan pengelolaan perbankan syariah BNI sebagai Unit Usaha Syariah (UUS) BNI. Pada tanggal 29 April 2000 Bank BNI Syariah beroperasi sebagai UUS BNI. Terdapat lima cabang saat awal berdirinya UUS BNI yang berlokasi di Yogyakarta, Pekalongan, Japara, Malang dan Banjarmasin. Pendirian BNI Syariah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia dalam surat No. 12/2/DPG/DPbS tentang Izin Prinsip Pendirian PT Bank BNI Syariah tanggal 8 Februari 2010. Pada tanggal 22 Maret 2010 Akta No. 156 yang merupakan Pemisahan Unit Usaha Syariah PT Bank Negara Indonesia (Persero) menjadi PT Bank BNI Syariah dan Akta No. 160 tentang Akta Pendirian PT Bank BNI Syariah yang keduanya sudah ditandatangani kemudian dilantik di depan Aulia Taufani sebagai pengganti notaris, Sujipto di Jakarta. Akta Pendirian juga telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-15574.AH.01.01, pada tanggal 25 Maret 2010.

Sejarah bank syariah mandiri Berawal dari penggabungan empat Bank BUMN, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo, menjadi satu kesatuan bank bernama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan merger tersebut juga menjadikan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebagai pemegang saham mayoritas di PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YPK) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.

PT BSB mempunyai rencana untuk mengubah sistem menjadi Bank Syariah, selanjutnya disetujui oleh PT. Bank Mandiri (Persero). Tim

pengembangan bank syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastruktur untuk mengubah kegiatan usaha PT BSB dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris: Sujipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Praktik Merger Tiga Bank Syariah

Perkembangan perekonomian global dalam jangka pendek akan sangat bergantung pada penanganan pandemi Covid-19, pemulihan ekonomi global, serta berlanjutnya stimulus fiskal dan moneter. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 4% hingga 5,5% (*Year On Year*) pada tahun 2021. Di sektor perbankan, pertumbuhan kredit dan DPK pada tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi 7% hingga 9% (YOY) dibandingkan tahun 2020. Perbankan syariah juga diharapkan melanjutkan momentum pertumbuhan sebelumnya. Pemerintah membantu pertumbuhan perekonomian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional adalah dengan merger tiga bank syariah pada tahun 2021. Sejalan dengan pelaksanaan merger tiga bank syariah, diharapkan perbankan syariah semakin terintegrasi, mampu membuat keuangan syariah di Indonesia dapat berkembang, dan berdaya saing di pasar global (BSI, 2021).

Tahapan-tahapan praktik merger tiga bank syariah (PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri):*pertama*, Tanggal 12 Oktober 2020, anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai perusahaan induk ketiga bank syariah (PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri) menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) yang merupakan perjanjian penggabungan bersyarat sebagai tahap awal merger tiga bank syariah.*Kedua*, Tanggal 13 Oktober 2020, PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri selaku peserta merger tiga bank syariah menyampaikan pengungkapan Keterbukaan Informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*Ketiga*, Tanggal 21 Oktober 2020, publikasi Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha oleh PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri dengan penjelasan berupa visi, misi, dan strategi bisnis bank hasil merger yang dipublikasikan melalui media digital seperti, *website* dan situs berita harian *online*. *Keempat*, Tanggal 6 November 2020, penandatanganan Rencana Penggabungan Bank Syariah untuk disampaikan kepada OJK.*Kelima*, Tanggal 11 Desember 2020, OJK melalui institusi pasar modal telah menyetujui atas pernyataan merger tiga bank syariah berdasarkan saham tiga bank syariah melalui surat OJK No. S-289/D.04/2020. *Keenam*, Tanggal 15 Desember 2020, RUPSLB Bank BRISyariah RUPSLB Bank BNI

Syariah, dan RUPSLB Bank Syariah Mandiri menyetujui rencana merger tiga bank syariah. Keputusan-keputusan yang terdapat dalam RUPSLB adalah menyetujui merger tiga bank syariah, menyetujui konsep akta penggabungan, meyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk., dan penetapan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada bank hasil merger. *Ketujuh*, Tanggal 16 Desember 2020, tiga bank syariah menandatangani Akta Penggabungan Tiga Bank Syariah (BSI, 2021). *Kedelapan*, Tanggal 27 Januari 2021, OJK perbankan menerbitkan Surat Keputusan No. 4/KDKD.04/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank BRI Syariah dan perubahan izin usaha PT Bank BRI Syariah menjadi izin usaha dari PT Bank Syariah Indonesia dan OJK menerbitkan surat resmi Nomor: SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan dan memberikan Izin Perubahan Nama menggunakan Izin Usaha. *Kesembilan*, Setelah mendapat persetujuan dari OJK, proses penggabungan dari ketiga bank syariah tersebut akan dilanjutkan dengan permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan dan permohonan pencatatan saham tambahan ke BEI. Pada tanggal 28 Januari 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat No. AHU-AH.01.10-0011384 tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah menjadi Bank BRI Syariah. *Kesepuluh*, Tanggal 1 Februari 2021, Bank Syariah Indonesia telah resmi terdaftar secara hukum dan mulai beroperasi serta dipublikasikan melalui media digital seperti, *website* dan situs berita *online*. Proses peluncuran integrasi operasional dan layanan mulai berjalan (BSI, 2021).

Setelah Bank Syariah Indonesia resmi beroperasi, Bank Syariah Indonesia memulai debutnya di pasar modal. Bank Syariah Indonesia masuk dalam daftar sepuluh emiten terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar (*market capitalization*) pada tanggal 4 Februari 2021. Selanjutnya, Bank Syariah Indonesia menyalurkan pembiayaan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp 8,6 triliun kepada lebih dari enam puluh ribu nasabah sebagai dukungan bagi pemulihan ekonomi nasional pada tanggal 23 April 2021. Dan, Forbes menobatkan Bank Syariah Indonesia sebagai *The World's Best Bank 2021* tanggal 26 Mei 2021 (BSI, 2021).

Dengan nama dan identitas baru, Bank Syariah Indonesia akan tetap di bursa dan dikategorikan terbuka dengan kode saham BRIS. Logo bank juga berubah setelah berganti nama. Dukungan 1.200 cabang, jaringan 1.700 mesin ATM, dan 20.000 karyawan, total aset yang akan diperoleh mencapai Rp 214 triliun. Sedangkan, saham Bank Syariah Indonesia akan dimiliki oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebesar 51,2%, kemudian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., sebesar 25% dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., akan

memiliki 17,4%. Sisanya dimiliki oleh DPLK-BRI Saham Syariah hingga 2% dan investor publik hingga 4,4%. Selain itu, Bank Syariah Indonesia menargetkan menjadi pemain global pada tahun 2025 dan menembus 10 besar bank syariah dunia dalam hal kapitalisasi pasar (BSI, 2021).

Kesesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 Terhadap Merger Tiga Bank Syariah

Dalam pelaksanaan merger tiga bank syariah, terdapat metode yang digunakan dan sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku sehingga dapat menguntungkan dan bermanfaat bagi bank yang melaksanakan merger bank. Merger bank diatur dalam tatanan hukum yang menjadi landasan hukumnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum mengatur pelaksanaan praktik merger tiga bank syariah adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Kesesuaian POJK No. 41/POJK.03/2019 terhadap Merger Tiga Bank Syariah

No.	Praktik Merger Tiga Bank Syariah	Kesesuaian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 terhadap Merger Tiga Bank Syariah
1	Anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai perusahaan induk ketiga bank syariah (PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri) menandatangani <i>Conditional Merger Agreement</i> (CMA) yang merupakan perjanjian penggabungan bersyarat sebagai tahap awal merger tiga bank syariah.	Merupakan rangkaian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
2	PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri selaku peserta merger tiga bank syariah menyampaikan pengungkapan Keterbukaan Informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan OJK.	Pasal 8: Direksi masing-masing bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan secara bersama-sama menyusun rancangan penggabungan atau peleburan. Bank menyampaikan informasi

		perkembangan penyusunan rancangan penggabungan atau peleburan kepada OJK. Rancangan penggabungan atau peleburan wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris masing-masing bank.
3	Publikasi Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha (merger) oleh PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri dengan penjelasan berupa visi, misi, dan strategi bisnis bank hasil merger yang dipublikasikan melalui media digital seperti, <i>website</i> dan situs berita harian <i>online</i> .	Pasal 10 ayat 1: Direksi bank yang akan melakukan penggabungan atau peleburan wajib mengumumkan ringkasan rancangan kepada masyarakat.
4	Penandatanganan Rencana Penggabungan Bank Syariah untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).	Pasal 11 poin a: Bersamaan dengan pengumuman ringkasan rancangan penggabungan atau peleburan bank wajib menyampaikan kepada OJK: a. Dokumen rancangan penggabungan atau peleburan yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
5	OJK melalui institusi pasar modal telah menyetujui atas pernyataan merger tiga bank syariah berdasarkan saham tiga bank syariah melalui surat OJK No. S-289/D.04/2020.	Tahapan ini bukan termasuk izin penggabungan perusahaan akan tetapi hanya penggabungan saham dari ketiga perusahaan peserta merger.
6	RUPSLB Bank BRISyariah RUPSLB Bank BNI Syariah, dan RUPSLB Bank Syariah Mandiri menyetujui rencana merger tiga bank syariah. Keputusan-keputusan yang terdapat dalam RUPSLB adalah menyetujui merger tiga bank syariah, menyetujui konsep	Pasal 14: Bank akan melakukan penggabungan atau peleburan meminta persetujuan RUPS masing-masing bank mengenai: a. Penggabungan atau peleburan yang akan

	akta penggabungan, meyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk., dan penetapan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada bank hasil merger.	dilakukan bank b. Rancangan penggabungan atau peleburan c. Konsep akta penggabungan atau peleburan.
7	Tiga bank syariah menandatangani Akta Penggabungan Tiga Bank Syariah.	Pasal 16 ayat 1: Persetujuan RUPS dituangkan ke dalam akta penggabungan atau peleburan yang dibuat oleh notaris dalam bahasa Indonesia.
8	OJK perbankan menerbitkan Surat Keputusan No. 4/KDKD.04/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan Usaha dan OJK menerbitkan surat resmi Nomor: SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan dan memberikan Izin Perubahan Nama menggunakan Izin Usaha	Pasal 18 ayat 1: OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin penggabungan atau peleburan.
9	Permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan dan permohonan pencatatan saham tambahan ke BEI. Pada tanggal 28 Januari 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat No. AHU-AH.01.10-0011384 tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah menjadi Bank BRI Syariah.	Pasal 19: Setelah memperoleh persetujuan dari OJK, bank mengajukan: a. Perubahan anggaran dasar bank hasil penggabungan kepada menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang membuat perubahan anggaran dasar, untuk memperoleh persetujuan atau sebagai pemberitahuan kepada menteri b. Permohonan pengesahan badan hukum bank hasil peleburan kepada menteri paling lambat 60

		(enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian. Pengajuan kepada menteri disertai dengan salinan akta penggabungan atau peleburan.
10	Bank Syariah Indonesia telah resmi terdaftar secara hukum dan mulai beroperasi serta dipublikasikan melalui media digital seperti, <i>website</i> dan situs berita <i>online</i> . Proses peluncuran integrasi operasional dan layanan mulai berjalan.	Pasal 21: Bank yang telah memperoleh izin penggabungan atau peleburan wajib: a. Menyusun laporan posisi keuangan penutupan masing-masing bank yang melakukan penggabungan atau peleburan b. Menyusun laporan posisi keuangan pembukaan bank hasil penggabungan atau peleburan c. Mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggabungan atau peleburan berlaku.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian penulis dan pembahasan permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, Proses merger Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah diawali dengan anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) sebagai perusahaan induk ketiga bank syariah (PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri) menandatangani *Conditional Merger Agreement* (CMA) yang merupakan perjanjian penggabungan bersyarat sebagai tahap awal merger tiga bank syariah, peserta merger tiga bank syariah menyampaikan pengungkapan Keterbukaan Informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), publikasi Ringkasan Rancangan Penggabungan Usaha oleh PT Bank BRI Syariah, PT Bank BNI Syariah, dan PT Bank Syariah Mandiri dengan penjelasan berupa visi, misi, dan strategi bisnis bank hasil

merger yang dipublikasikan melalui media digital seperti, website dan situs berita harian online, penandatanganan Rencana Penggabungan Bank Syariah untuk disampaikan kepada OJK, OJK melalui institusi pasar modal telah menyetujui atas pernyataan merger tiga bank syariah berdasarkan saham tiga bank syariah melalui surat OJK No. S-289/D.04/2020, RUPSLB Bank BRISyariah RUPSLB Bank BNI Syariah, dan RUPSLB Bank Syariah Mandiri menyetujui rencana merger tiga bank syariah. Keputusan-keputusan yang terdapat dalam RUPSLB adalah menyetujui merger tiga bank syariah, menyetujui konsep akta penggabungan, meyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Indonesia Tbk., dan penetapan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan pada bank hasil merger, tiga bank syariah menandatangani Akta Penggabungan Tiga Bank Syariah, OJK perbankan menerbitkan Surat Keputusan No. 4/KDKD.04/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah menjadi PT Bank BRI Syariah dan perubahan izin usaha PT Bank BRI Syariah menjadi izin usaha dari PT Bank Syariah Indonesia dan OJK menerbitkan surat resmi Nomor: SR-3/PB.1/2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan dan memberikan Izin Perubahan Nama menggunakan Izin Usaha, permohonan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan dan permohonan pencatatan saham tambahan ke BEI, tanggal 28 Januari 2021 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan surat No. AHU-AH.01.10-0011384 tentang Penerimaan Pemberitahuan Penggabungan Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah menjadi Bank BRI Syariah, Bank Syariah Indonesia telah resmi terdaftar secara hukum dan mulai beroperasi serta dipublikasikan melalui media digital seperti, *website* dan situs berita *online*, yang mana sekurang-kurangnya terdapat sepuluh tahapan dalam proses merger tersebut.*Kedua*, Praktik merger tiga bank syariah mengacu dan berkesesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum.

Saran dalam penelitian ini yaitu; kepada akademisi dan praktisi perbankan agar melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam terkait aspek yuridis praktik merger perbankan syariah. Kemudian, kepada akademisi dan praktisi perbankan agar melakukan penelitian lebih lanjut dalam menganalisis kinerja merger bank syariah ataupun mengukur efektivitas merger tersebut yang mana diharapkan dapat menghasilkan ekosistem syariah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Atikah, Ika. (2021). Maimunah, Fuad Zainuddin, "Penguatan Merger Bank syariah BUMN dan Dampaknya Dalam Stabilitas Perekonomian Negara". *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*. Vol. 8 No. 2.
- Irwati. (2017). "Perlindungan Hukum Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Terbatas Bagi Pemegang Saham Minoritas". *Diponegoro Private Law Riview*. Vol. 1 No. 1.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Khasanah, Nur. (2017). "Analisis Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dan Akuisisi (Studi Kasus dalam Perusahaan Non Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015)", Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pangaraian.
- Manurung, Adler Haymans. (2021). John EHJ, Ni Nyoman Sawitri, *Restrukturasi Perusahaan: Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi Serta Pembiayaannya*. Jakarta: PT Adler Manurung Press..
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi dan Konversi Bank Umum, Pasal 1, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, dan 21.
- Ramadhan, Muhammad Rauuf. (2021). "Merger Bank syariah dan Pengembangan UMKM di Indonesia", *Jurnal Syntax Transformation*. Vol. 2 No. 6.
- Romadhon, Bagus dan Sutantri. (2021). "Korelasi Merger Tiga Bank syariah dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah", *At-Tamwil*. Vol. 3 No. 1.
- Rukajat, Ajat. (2018). *Pendekatan Penelelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Sultoni, Hasan dan Kiki Mardiana. (2021) "Pengaruh Merger Tiga Bank syariah BUMN Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia".
- Tarigan, Josua. Swenjadi Yenewan, dan Grace Natalia. *Merger dan Akuisisi: Perspektif Strategis dan Kondisi Indonesia*.
- Ulfa, Alif. (2021). "Dampak Penggabungan Tiga Bank di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 7 No. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal 1 Ayat 29-31.
- Untung, Budi. (2019). *Hukum Merger*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sumber Internet:

- BSI, "BSI, Bank Hasil Merger Untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Syariah", *Situs Resmi Bank Syariah Indonesia*, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/bsi-bank-hasil-merger-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-syariah>, (4 September 2021), diakses pada 27 Oktober 2021 pukul 10.30 WIB.
- BSI. (2021). "Laporan Tahunan Bank BRI Syariah 2010", *Situs Resmi Bank Syariah Indonesia*, <https://www.bankbsi.co.id/company-information/reports>
- BSI. (2021). "Wamen BUMN: Legal Merger 3 Bank Syariah Siap Diluncurkan 1 Februari", *Situs Resmi Bank Syariah Indonesia*, <https://www.bankbsi.co.id/news-update/berita/wamen-bumn-legal-merger-3-bank-syariah-siap-diluncurkan-1-februari>.
- Puspaningtyas, Lida dan Elba Damhuri. (2022). "7 Alasan Pentingnya Merger Bank Syariah BUMN", *Republika Online*, 14 Oktober 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qi6gay440/7-alasan-pentingnya-merger-bank-syariah-bumn-part1>.
- Sulaeman. (2020). "Alasan BRI Syariah Terpilih Menjadi Surviving Entity Merger Bank syariah BUMN". *Merdeka Online*. 13 Oktober 2020, <https://www.merdeka.com/uang/alasan-brisyariah-terpilih-menjadi-surviving-entity-merger-bank-syariah-bumn.html>.